1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Perkembangan inflasi di Kabupaten Bojonegoro pada Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

   a. Pada bulan Juli 2026 Kabupaten Bojonegoro mengalami inflasi *Month to Month* (MtM) sebesar 0,47% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,58. Laju Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 0,91% sedangkan laju inflasi *Year on Year* (YoY) sebesar 2,27%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Juli 2026, antara lain Sigaret Kretek Mesin (SKM), bensin, bawang putih, mainan anak, Sigaret Kretek Tangan (SKT), air kemasan, soto, minyak goreng, ketimun, alat-alat listrik, ikan bandeng/ikan bolu, kopi siap saji, dan sekolah dasar. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juli 2026, antara lain emas perhiasan, pindang asin, bensin, minyak goreng, sewa rumah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), tahu mentah, tomat, bawang putih, mainan anak, air kemasan, terong, jagung manis, bahan bakar rumah tangga, daging sapi, Sigaret Putih Mesin (SPM), soto, bakso siap santap, wortel, dan tempe.

   b. Pada bulan Agustus 2026 Kabupaten Bojonegoro mengalami inflasi *Month to Month* (MtM) sebesar 0,54% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 113,19. Laju Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 1,46%, sedangkan laju inflasi *Year on Year* (YoY) sebesar 3,06%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Agustus 2026, antara lain daging ayam ras, cabai rawit, semangka, kacang panjang, kopi siap saji, udang basah, jeruk, ikan bandeng/ikan bolu, panci, minyak goreng, emas perhiasan, jagung manis, daging sapi, ikan gurame, buncis, dan sepeda. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Agustus 2026, antara lain daging ayam ras, emas perhiasan, minyak goreng, cabai rawit, pindang asin, bensin, tomat, Sigaret Kretek Mesin (SKM), sewa rumah, tahu mentah, semangka, mainan anak, daging sapi, air kemasan, jagung manis, bahan bakar rumah tangga, terong, wortel, ikan gurame, dan kopi siap saji.

   c. Pada bulan September 2026 Kabupaten Bojonegoro mengalami inflasi *Month to Month* (MtM) sebesar 0,24% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 113,46. Laju Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 1,70%, sedangkan laju inflasi *Year on Year* (YoY) sebesar 2,91%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada September 2026, antara lain telur ayam ras, cabai rawit, jeruk, daging ayam ras, jagung manis, daging sapi, ikan bandeng/ikan bolu, melon, ikan nila, tomat, kue basah, dan pelumas/ oli mesin. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada September 2026, antara lain emas perhiasan, tomat, cabai rawit, daging ayam ras, pindang asin, minyak goreng, bensin, sewa rumah, tahu mentah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), jagung manis, daging sapi, mainan anak, air kemasan, bakso siap santap, bahan bakar rumah tangga, kopi siap saji, wortel, ikan gurame, dan tempe.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bojonegoro pada Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

   Bulan Juli 2026:

Harga bawang merah mengalami penurunan akibat panen raya lokal yang meningkatkan

1.
pasokan bawang merah, sehingga harga pasar turun akibat ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan.
2. Kenaikan harga bawang putih terjadi akibat minimnya pasokan di pasaran, mengingat komoditas ini masih sangat bergantung pada impor.
3. Penurunan harga telur ayam disebabkan oleh liburnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibeberapa sekolah. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pasokan di pasaran yang tidak diimbangi dengan serapan atau daya beli masyarakat yang tinggi.

Bulan Agustus 2026:

1. Kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari peternak serta tingginya penyerapan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut mengakibatkan harga di pasaran melonjak.
2. Kenaikan harga cabai rawit di Kabupaten Bojonegoro akibat berkurangnya stok cabai rawit dibandingkan bulan sebelumnya.
3. Penurunan harga tomat terjadi akibat melimpahnya pasokan dari hasil panen raya lokal di sejumlah wilayah. Kondisi kelebihan pasokan *(oversupply)* ini tidak diimbangi dengan peningkatan penyerapan pasar yang sepadan, sehingga memicu anjloknya harga komoditas tomat.

Bulan September 2026:

1. Kenaikan harga telur ayam ras disebabkan oleh berkurangnya produksi dari peternak dibandingkan bulan sebelumnya serta tingginya penyerapan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut mengakibatkan harga di pasaran meningkat.
2. Kenaikan harga cabai rawit di Kabupaten Bojonegoro akibat berkurangnya stok cabai rawit dibandingkan bulan sebelumnya.
3. Bawang putih mengalami penurunan harga seiring meningkatnya pasokan komoditas bumbu dapur dari sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bojonegoro pada Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya menjaga keterjangkauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah melaksanakan 32 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan GPM secara berkelanjutan menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menyediakan bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat.
2. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkopum) telah melaksanakan 72 kali Operasi Pasar Murah (OPM), dengan 30 kegiatan di antaranya dilaksanakan selama bulan Ramadan sebagai langkah untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Komoditas yang disediakan dalam kegiatan OPM meliputi beras SPHP, beras premium, Minyakita, telur ayam ras, gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, kentang, wortel, serta LPG.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

3. Untuk mendukung kelancaran distribusi dan menjamin ketersediaan energi, Disdagkopum secara berkala melakukan monitoring terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Monitoring tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi keterlambatan pasokan maupun gangguan distribusi yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
4. Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat dan mendorong peningkatan produksi pangan dari lingkungan rumah tangga, DKPP telah mendistribusikan sekitar 35.760 bibit tanaman pekarangan kepada masyarakat. Bantuan bibit tersebut diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, sekaligus mendukung ketersediaan pasokan komoditas hortikultura dan upaya pengendalian inflasi dari sisi produksi.
5. Sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui DKPP telah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 kepada sejumlah Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung modernisasi pertanian, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta mendorong peningkatan produksi pangan sebagai bagian dari penguatan ketersediaan pasokan daerah.
6. DKPP Bojonegoro terus memperkuat akses pertanian melalui pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang kurang lebih 27.500 meter yang tersebar di sejumlah wilayah untuk mendukung mobilitas petani serta kelancaran pengangkutan sarana dan hasil pertanian.
7. Pemkab Bojonegoro melalui DKPP telah menuntaskan pendistribusian 526.925 kilogram pupuk NPK kepada 55 poktan/gapoktan untuk mendukung budidaya tembakau pada lahan seluas 3.011 hektare, sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tembakau sekaligus membantu menekan biaya produksi petani.
8. Dalam rangka menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat pemasaran hasil peternakan lokal, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) terus mendorong pelaksanaan Program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri). Program Gayatri turut meningkatkan pendapatan penerima manfaat sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan dan pemasaran telur hasil produksi peternak kepada pedagang dan masyarakat sekitar..
9. Dishub Bojonegoro melaksanakan Program Angkutan Pelajar (APEL) Gratis dengan dukungan 111 armada untuk melayani 10.442 pelajar dari 152 sekolah, guna mendukung akses pendidikan yang aman sekaligus mengurangi beban biaya transportasi bagi orang tua.
10. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong percepatan pengembangan kawasan tebu melalui sosialisasi, pemetaan, dan optimalisasi potensi lahan bersama HKTI, petani, dan perangkat daerah terkait, dengan target perluasan area tanam sebesar 2.597,5 hektare serta mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dalam mendukung kemandirian gula nasional.
11. PMI Kabupaten Bojonegoro melaksanakan distribusi air bersih selama musim kemarau sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang hingga 29 Agustus 2026 telah berlangsung selama 19 hari, menjangkau 7 kecamatan dengan total distribusi sekitar 190 ribu liter, disertai edukasi kebersihan dan kesehatan serta koordinasi dengan BPBD dalam penentuan lokasi sasaran.
12. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong kemandirian pangan melalui Gerakan ASN Peduli Pangan dengan peluncuran beras lokal Rajekwesi produksi Perumda Pangan

Mandiri, yang melibatkan ASN, BUMD, dan masyarakat dalam penggunaan serta promosi produk pangan lokal guna meningkatkan serapan hasil pertanian, menjaga stabilitas harga, dan mendukung kesejahteraan petani.

13. Pemkab Bojonegoro melalui Dinperinaker menyelenggarakan Bejo Career Day 2026 sebagai upaya memfasilitasi pencari kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran, dengan menyediakan sekitar 1.000 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan serta layanan walk-in interview, konsultasi karier, dan sosialisasi peluang kerja internasional melalui pelatihan Bahasa Jepang.
14. Dalam rangka mendukung perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PT Shou Fong Lastindo membuka kesempatan kerja melalui mekanisme walk-in interview dengan kebutuhan sebanyak 3.000 karyawan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperkuat daya beli masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung stabilitas perekonomian daerah.
15. Pemkab Bojonegoro melalui Dinpora melaksanakan Bootcamp Kemandirian Ekonomi Pemuda Tahun 2026 untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan daya saing pemuda dalam mengembangkan usaha produktif berbasis potensi daerah, melalui pelatihan bidang pertanian, usaha jasa, dan kerajinan, serta fasilitasi NIB dan penguatan jejaring dengan pelaku usaha dan mitra strategis.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bojonegoro pada Triwulan III Tahun 2026 adalah berdasarkan perkembangan inflasi dan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bojonegoro secara umum telah berjalan dengan baik melalui penguatan aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pada periode Juli–September 2026, inflasi *Month to Month* (MtM) tercatat masing-masing sebesar 0,47%, 0,54%, dan 0,24%, sedangkan inflasi *Year on Year* (YoY) masing-masing sebesar 2,27%, 3,06%, dan 2,91%. Pergerakan inflasi tersebut menunjukkan adanya dinamika harga komoditas pangan yang dipengaruhi oleh perubahan pasokan, produksi, dan tingkat penyerapan pasar. Kenaikan harga bawang putih, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit menjadi salah satu perhatian, sementara komoditas seperti bawang merah, tomat, dan bawang putih pada periode tertentu mengalami penurunan harga seiring meningkatnya pasokan.

Dalam merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan berbagai intervensi, antara lain melalui 32 kali GPM dan 72 kali OPM untuk menjaga keterjangkauan harga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dari sisi ketersediaan pasokan, dilakukan distribusi 35.760 bibit tanaman pekarangan, penyaluran alsintan, pembangunan JUT, distribusi pupuk NPK, penguatan Program Gayatri, serta pengembangan kawasan tebu. Monitoring BBM dan distribusi air bersih juga dilakukan untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi kemarau. Selain itu, penguatan daya beli dan perekonomian masyarakat dilakukan melalui Program APEL Gratis, Gerakan ASN Peduli Pangan, Bejo Career Day, dan Bootcamp Kemandirian Ekonomi Pemuda.

Secara keseluruhan, berbagai kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama fluktuasi harga komoditas hortikultura akibat kondisi panen dan pasokan, ketergantungan

bawang putih terhadap pasokan luar daerah/impor, serta perubahan tingkat penyerapan komoditas akibat pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemantauan harga dan pasokan secara berkala, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan, optimalisasi produksi pangan lokal, serta penguatan strategi distribusi dan penyerapan hasil produksi agar gejolak harga dapat diantisipasi dan stabilitas inflasi di Kabupaten Bojonegoro tetap terjaga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bojonegoro pada Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pemantauan harga, pasokan, dan distribusi komoditas pangan strategis secara berkala, khususnya beras, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan komoditas hortikultura lainnya, sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga.
2. Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan GPM dan OPM pada wilayah dan periode yang mengalami kenaikan harga, terutama menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), dengan memperhatikan ketersediaan komoditas dan kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan produksi pangan lokal melalui optimalisasi lahan pekarangan, bantuan bibit, alsintan, pupuk, pembangunan JUT, pengembangan komoditas hortikultura, serta penguatan program peternakan seperti Gayatri guna menjaga kesinambungan pasokan dan mengurangi risiko gejolak harga.
4. Mengantisipasi fluktuasi harga komoditas hortikultura akibat perbedaan kondisi panen dan pasokan dengan memperkuat koordinasi antarwilayah, pemetaan sentra produksi, serta mendorong penyerapan hasil panen ketika terjadi kelebihan pasokan agar tidak terjadi penurunan harga yang merugikan petani.
5. Memperkuat ketersediaan dan distribusi komoditas yang masih bergantung pada pasokan luar daerah, khususnya bawang putih, melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, distributor, dan pelaku usaha untuk menjamin kelancaran pasokan dan mengantisipasi keterlambatan distribusi.
6. Memperkuat sinergi dengan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemetaan kebutuhan dan penyerapan komoditas pangan lokal, sehingga perubahan kebutuhan akibat pelaksanaan maupun penghentian sementara program tidak menimbulkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, khususnya pada komoditas telur dan daging ayam ras.
7. Meningkatkan kelancaran distribusi dan konektivitas sektor pertanian melalui pemeliharaan dan pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT), monitoring BBM, serta koordinasi distribusi pangan untuk memastikan sarana produksi dan hasil pertanian dapat bergerak secara efisien.
8. Memperkuat ketahanan pangan dan mitigasi dampak perubahan cuaca, khususnya pada musim kemarau, melalui optimalisasi sumber air, pompanisasi, jaringan irigasi, embung, pola tanam, serta perlindungan usaha tani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
9. Meningkatkan penyerapan dan pemasaran hasil produksi lokal, antara lain melalui Gerakan ASN Peduli Pangan, pemanfaatan produk pangan lokal, penguatan peran BUMD/BUMDes, serta kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat sebagai upaya menjaga kesinambungan pasar bagi hasil produksi petani dan peternak.

Memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengembangan

10. UMKM, penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan pemuda, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal guna meningkatkan daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat.
11. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi TPID secara berkala dengan melibatkan perangkat daerah, BPS, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan langkah intervensi yang cepat dan tepat terhadap perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis.
12. Memperkuat komunikasi efektif kepada masyarakat mengenai perkembangan harga, ketersediaan bahan pangan, pelaksanaan program stabilisasi harga, serta langkah pemerintah dalam pengendalian inflasi guna menjaga ekspektasi masyarakat dan mencegah kepanikan dalam pembelian komoditas.